BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Sub Bagian Akuntansi Bagian Akuntansi Pemerintah Kota Bandung, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pemerintah Kota Bandung telah diterapkan dengan baik, hal ini terlihat dari adanya penyajian laporan keuangan yang sudah meliputi laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada Pemerintah Kota Bandung penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) masih memiliki kelemahan yang ditemukan oleh peneliti, yaitu kurangnya pemahaman karyawan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga dalam pelaksanaannya selalu saja ada yang menyimpang dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung sudah berjalan dengan baik, hal tersebut terlihat dengan adanya empat komponen pokok pengelolaan keuangan yaitu : perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta telah sesuainya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

pada Pemerintah Kota Bandung ternyata masih memiliki kelemahan yang ditemukan oleh peneliti, yaitu masih adanya unsur politis dalam pelaksanaannya sehingga dapat menghambat terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Peranan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung memiliki hubungan yang sangat erat. Keeratan hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu sebesar 0,808 dan termasuk kedalam kategori sangat erat (sangat reliabel). Besarnya peranan standar akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah sebesar 62,29 %, sisanya sebesar 37,71 % dipengaruhi oleh faktor lain seperti kebijakan pemerintah dan audit internal. Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis yang diajukan diterima atau dengan kata lain standar akuntansi pemerintahan memiliki peranan dalam pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah juga akan semakin baik. Kelemahan yang ditemukan peneliti pada Pemerintah Kota Bandung adalah masih kurang efektifnya penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian atas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pengelolaan keuangan daerah pada Sub Bagian Akuntansi Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bandung, penulis merasa perlu untuk menambahkan beberapa saran dalam mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada, yaitu :

1. Peneliti menyarankan agar pelaksanaan penerapan standar akuntansi pemerintahan lebih optimal maka pemahaman karyawan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditingkatkan, salah satunya dengan cara adanya pelatihan terpadu dari Kepala Bagian kepada karyawan pelaksana pengelolaan keuangan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
2. Adanya pengawasan yang lebih ketat lagi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar praktek-praktek yang mengandung unsur politis yang hanya menguntungkan salah satu pihak dapat diminimalisir atau dihilangkan. Dan tentunya ini juga harus disertai dengan kesadaran dari aparat pemerintah itu sendiri bahwa praktek yang seperti disebutkan diatas tidak boleh dilakukan.
3. Agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka penerapan standar akuntansi pemerintahan juga harus lebih efektif lagi. Dan untuk peneliti selanjutnya, faktor lain seperti kebijakan pemerintah dan audit internal juga harus diperhatikan.